

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974 Fax. (021) 3521985

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/70/SET.M.EKON.4/01/2026

Yth : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Hal : Penyampaian Narasi Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Triwulan IV T.A. 2025
Tanggal : 14 Januari 2026
Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Merujuk Nota Dinas Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor AK.03.01/12/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan IV T.A 2025, dengan hormat kami sampaikan Laporan Narasi Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk periode Triwulan IV Tahun 2025 beserta bukti dukung, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Sumber
Daya Manusia,



Hari Nugroho
NIP 19800416 2001121002

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kepala Bagian di Lingkungan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Koordinator Tim Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian Tahunan (%)
I	Sasaran Program 1. Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di Bidang Umum dan SDM					
1.1	Indikator 1.1 Indeks Penyelenggaraan Arsip	Indeks	90	98,42	98,42	109,4%
1.2	Indikator 1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator	Baik	Nilai diukur tahunan	Baik	100%* 100%**
1.3	Indikator 1.3 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks	3,6	100%	100%	100%
1.4	Indikator 1.4 Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	Baik	Nilai diukur tahunan	100% capaian internal	100%
1.5	Indikator 1.5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	85	N/A	75,76	89,12%* 100%**
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian Yang Efektif					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu	Persentase	95%	Nilai diukur tahunan	100%	100%* 100%**
2.2	Indikator 2.2 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	Indeks	3 dari 5	Nilai diukur tahunan	5 dari 5	100%* 100%**
2.3	Indikator 2.3 Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik	Persentase	90%	98.09	98,09	109%

2.4	Indikator 2.4 Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	100%	100
2.5	Indikator 2.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan	Persentase	23,6%	N/A	22,9%	100%* 97%**
2.6	Indikator 2.6 Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	21,4%	N/A	12,86%	100%* 60%**
IVI	Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks	3 dari 4	N/A	4 dari 4	120%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola di Unit Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Persentase	85%	85%**	96%*	112%*

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Kinerja Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di Bidang Umum dan SDM

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di Bidang Umum dan SDM ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Arsip;
2. Indeks Penyelenggaraan Arsip;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA);
5. Indeks NSPK Manajemen ASN; dan
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Indeks

Penyelenggaraan Arsip

Latar Belakang

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen, baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga publik dan bisnis. Ketersediaan arsip yang efektif, efisien, lengkap dan berkualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana setiap Lembaga Pemerintahan maupun publik perlu

melakukan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan standar, prosedur dan kaidah kearsipan yang berlaku.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009, setiap tahunnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan kearsipan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah dari pengelolaan kearsipan yang telah dilakukan terhadap kesesuaian standar, prosedur dan kaidah kearsipan yang berlaku. Hasil dari pengawasan kearsipan inilah yang menjadi tolak ukur penilaian dalam mengetahui indeks pengelolaan arsip dari masing-masing Kementerian/Lembaga Daerah. Meliputi seluruh penyelenggaraan kearsipan mulai dari Penciptaan, Penggunaan Pemeliharaan, Penyusutan, Sumber Daya Manusia Kearsipan, dan Sarana Prasarana Kearsipan. Formulasi penilaiannya adalah 60% pengawasan eksternal dan 40% pengawasan internal. Kepatuhan seluruh unit kerja dalam pengelolaan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2024.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Penyelenggaraan Arsip yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 98,42 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 90 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Indeks Penyelenggaraan Arsip	Indeks	90	98,42	109,4%

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 merupakan tahap akhir dalam rangkaian penyelenggaraan kearsipan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah berjalan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku sehingga target tahun 2025 telah terpenuhi.

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024. Realisasi triwulan IV didorong dengan pelaksanaan kegiatan setelah penilaian pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya maka diprediksikan Indeks Penyelenggaraan Arsip akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Indeks Penyelenggaraan Arsip			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penataan Arsip Inaktif	Terlaksana	Penataan arsip aktif dilakukan secara rutin selama 1 Tahun berjalan dilakukan dengan memberkaskan, mendata, dan menata arsip inaktif pada Ruang simpan arsip inaktif.
2.	Monitoring Pengelolaan Arsip Aktif	Terlaksana	Monitoring pengelolaan arsip aktif dilaksanakan setelah pelaksanaan pengawasan kearsipan
3.	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024	Terlaksana	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi dan LAKI 35 Unit Pengolah
4.	Penghargaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	Terlaksana	Hasil pengawasan kearsipan internal diumumkan melalui Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kemenko Perekonomian, disertai dengan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) sebagai bahan evaluasi kearsipan bagi seluruh unit pengolah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan dan penyelesaiannya dilakukan di dalam kantor Kemenko Perekonomian sehingga tidak membebani DIPA Kemenko Perekonomian:

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ruang simpan arsip inaktif yang terbatas;
2. terdapat 2 dari 4 instrumen kearsipan yang masih dalam proses pembahasan dan legal draft.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan proses pemusnahan dan penyerahan arsip secara rutin untuk memberikan ruang simpan arsip inaktif yang baru diolah;
2. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam pembahasan Rancangan Permenko Instrumen kearsipan.

1.2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Latar Belakang

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang disusun dalam rangka mendorong K/L untuk melaksanakan belanja sesuai prinsip *value for money*, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja satuan kerja.

Sebelumnya di tahun 2024, paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang berfokus pada perwujudan *value for money* pada pelaksanaan belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja satuan kerja. Dengan formulasi perhitungan yang mempertimbangkan 3 aspek pengukuran dan 8 indikator diantaranya:

1. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman IVI DIPA;
2. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta
3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output

Namun pada tahun 2025 telah mengalami penyesuaian dan fokus pada optimalisasi pencapaian output dan efisiensi anggaran yang sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar Baik. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada predikat "BAIK" dimana dapat diraih dengan skor IKPA diatas 89 s.d. 94 dan hanya memiliki target tahunan tanpa ada target per triwulan. Hal ini sesuai dengan Jenis Konsolidasi Periode Take Last Known (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

ingga Triwulan IV Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 93.45 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar Baik dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator	Baik	Baik	100%

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 sedikit berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh kerja sama internal antar satker Kemenko Perekonomian dan eksternal yang baik dengan stakeholders terkait maka diprediksikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2025	Terlaksana	Pokja Manajemen Keuangan telah menyelenggarakan Sosialisasi LLAT yang diikuti oleh para PPK, para Bendahara Pembantu dan para SPK. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelancaran pembayaran dan memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2025.
2.	Penyelenggaraan Koordinasi Terkait Dengan Kebutuhan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Akhir TA 2025	Terlaksana	Koordinasi untuk pengajuan UP/TUP kepada unit kerja

3.	Penyelenggaraan Asistensi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode TW IV 2025	Terlaksana	Asistensi, koordinasi dan monitoring pada Triwulan IV telah terlaksana dengan melibatkan stakedholders yakni para PPK, SPK, serta Mitra KPPN Jakarta II
4.	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di Bidang Perbendaharaan Bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara Sesuai Dengan Standar Kompetensi Yang Diperkirakan	Terlaksana	Pada Triwulan IV fasilitasi pelatihan pejabat perbendaharaan tidak terlaksana karena tidak ada jadwal pelatihan dari Instansi Pembina serta usulan pejabat yang mengikuti pelatihan. Dan sebagian besar PPK, Bendahara sudah memiliki sertifikat.
5.	Pengawasan Dan Pengendalian Tagihan Kontraktual Dan RPATA Pada Unit Kerja Terkait	Terlaksana	Pengawasan dan pengendalian tagihan kontraktual dan RPATA telah terlaksana dengan meningkatkan komunikasi yang aktif kepada para PPK, SPK, dan BPP.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja, yaitu mengingatkan kepada Pejabat Perbendaharaan Tahun 2025 untuk mengajukan usulan Calon Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026 yang akan diikutsertakan pelatihan Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas ruang rapat Graha Sawala untuk Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun yang dilaksanakan secara hybrid di kantor Kemenko Perekonomian Gd. Ali Wardhana.
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas ruang rapat untuk Pelaksanaan Workshop Pengelolaan Pengetahuan untuk Efisiensi dan Akurasi Layanan Keuangan Kemenko Perekonomian.
3. Memaksimalkan pendampingan kepada unit kerja melalui teknologi komunikasi seperti *Zoom*, *WhatsApp*, ataupun tatap muka.

sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp21.950.292. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Evaluasi Kinerja Biro Umum dan SDM yang akan dilakukan pada Triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketidaksesuaian antara pengisian RPD yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan penyerapan anggaran yang menyebabkan rendahnya nilai Deviasi Hal IV DIPA;
2. Terdapat peraturan internal KPPN Jkt II tahun 2025 yg memberlakukan syarat pengajuan SPM UP per BPP harus memenuhi 50% UP yg dikelola setiap BPP serta kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan frekuensi kegiatan di unit kerja, sehingga belum semua BPP dapat melakukan revolving setiap bulan. 2 hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan presentase revolving secara keseluruhan (satker).
3. Belum optimalnya pengelolaan penggunaan TUP sehingga masih ada setoran TUP sebesar Rp2.660.356.088

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan yang dikoordinasikan oleh bagian Anggaran Biro MKKS;
2. Mendorong penggunaan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai minimal 1 bulan sekali;
3. Melaksanakan monitoring kontrak akhir tahun untuk memastikan kelancaran pembayaran dan penyerapan anggaran satker 427752; 427755;
4. Melaksanakan rapat teknis dengan unit kerja/PPK yang bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang ditemui serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memperlancar pekerjaan.

1.3. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Latar Belakang

Menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dalam upaya melakukan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, maka kegiatan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang haruslah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pengelola Barang yang mengedepankan pengelolaan BMN dengan prinsip *Prudence* dan *Zero Mistake*, sehingga diberikanlah sebuah instrumen penilaian terhadap pengelolaan BMN pada masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang penilaiannya dilakukan setiap tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,6 (dari 4), penetapan target tahun 2025 didasarkan pada kondisi parameter yang tidak sepenuhnya menjadi kendali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga target kinerja mencakup upaya terbaik yang dapat dilakukan dalam memenuhi parameter yang digunakan dalam Penilaian IPA. Adapun target Triwulan IV sebesar 100% atas pemenuhan Rencana Aksi yang ditetapkan guna mendukung upaya pemenuhan target kinerja tahunan.

Rencana aksi Triwulan IV yang telah terealisasi sebagai bagian dari pemenuhan parameter IPA adalah sebesar 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks	100%** (dalam upaya pemenuhan Target Indeks 3.6*)	100%*	100%*

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda jauh dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh kerjasama internal yang baik antar Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta koordinasi eksternal yang efektif dan efisien bersama Pengelola Barang. Dengan kondisi tersebut, maka diprediksikan IPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.3 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyampaian RKBMN Tahun 2027	Terlaksana	Dokumen disampaikan dengan Tepat Waktu sesuai ketentuan Pengelola Barang
2.	Pelaksanaan <i>Stock Opname</i> Barang Persediaan Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang di tentukan oleh APIP
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Validasi Aset Tak Berwujud Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan laporan

4.	Penyusunan Daftar Standar Harga Barang Persediaan Periode Desember Tahun 2025	Terlaksana	Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan laporan
5.	Penyelesaian Tindaklanjut BMN Rusak Berat Tahun 2025	Terlaksana	Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan laporan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas transaksi BMN yang muncul pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menjaga kerjasama yang baik antara Pengelola BMN dengan seluruh pihak terkait pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Melakukan mitigasi dan penyelesaian kendala yang muncul secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pengelola Barang

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya sesuai dengan kondisi efisiensi anggaran. Sehingga pemenuhan Rencana Aksi IPA Triwulan II 2025 tidak mengeluarkan biaya yang dapat membebani DIPA Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja tahunan. Namun, dalam upaya mencapai target kinerja tahunan, dapat dilakukan mitigasi sebagai bentuk pencegahan munculnya kendala yang dapat menghambat kinerja, upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal bersama Staf Pengelola Keuangan (SPK) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan transaksi BMN yang dapat menghambat proses penyusunan laporan-laporan *mandatory*;
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas transaksi Belanja Pemeliharaan untuk mencegah munculnya potensi reklasifikasi pengakuan Aset dari transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan proses pengakuan Aset yang semestinya; dan
3. Melakukan proses bisnis Pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjaga potensi munculnya temuan hasil audit tetap rendah.

1.4. Indeks NSPK Manajemen ASN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, Indeks Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

Komponen utama dari penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN ini dengan melihat keselarasan antara Implementasi Manajemen ASN oleh K/L sehingga sejalan dengan tujuan sistem merit atau UU ASN. Metode pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen Manajemen ASN yang telah disusun oleh K/L dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Penilaian terhadap Indeks ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara setiap tahun pada tahun berikutnya setelah dokumen pendukung disubmit pada aplikasi indeks NSPK BKN.

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN sudah diformulasikan oleh aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, dengan predikat sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
85,01 - 100	Unggul
70 - 85,01	Baik
55,01 - 70	Cukup
40 - 55	Kurang
25 - 40	Buruk

BKN melalui Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II menilai bukti dukung dan laporan yang disampaikan K/L melalui aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN dan dilakukan panel sesama audiwan (penilai) untuk selanjutnya ditetapkan nilai akhirnya dan disampaikan predikatnya melalui Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Tidak ada petunjuk teknis penilaian yang diberikan kepada Instansi namun instansi wajib memenuhi 18 indikator kepegawaian pada Indeks NSPK Manajemen ASN: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Jabatan, Pangkat, Pola Karier, Pengembangan Karier ASN, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik, Pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, Pensiun, Perlindungan, Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks NSPK Manajemen ASN yang mencapai target yang telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	Baik*	100% (capaian internal tahunan)	100%* 100%**

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan nilainya akan ditetapkan oleh BKN melalui aplikasi indeksnspk.bkn.go.id pada bulan Oktober tahun berikutnya, sehingga pada Triwulan ini masih belum bisa dilaporkan. Adapun nilai Indeks NSPK pada tahun 2023 adalah pada kategori "Sangat Baik", sedangkan nilai Indeks NSPK pada tahun 2024 masih dalam proses penilaian yang akan keluar pada bulan Oktober 2025. Penilaian Indeks NSPK dilakukan melalui sistem berbasis website yaitu pada indeksnspk.bkn.go.id.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.4 Indeks NSPK Manajemen ASN			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Manajemen ASN Triwulan III	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Manajemen ASN pada Triwulan III telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN. Telah dilaksanakan penegasan lebih lanjut kepada pejabat pimpinan tinggi dalam rangka pembinaan pegawai yang berpotensi melanggar disiplin PNS sehingga tidak berpotensi

			melanggar ketentuan Peraturan Disiplin
2.	Melaksanakan Manajemen ASN Sesuai Dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 13 Oktober 2025 telah dilaksanakan promosi pejabat fungsional yaitu sebanyak 24 PNS resmi memperoleh kenaikan jenjang, antara lain 1 orang naik ke jabatan fungsional Pranata Humas Ahli Madya, 7 orang naik ke jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya, 15 orang naik ke jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, dan 1 orang naik ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda. • Pelaksanaan Sosialisasi SDM series #1: Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 28 Oktober 2025 secara daring, dengan peserta yaitu seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkolaborasi dengan Inspektorat. Narasumber pertama yaitu Bapak Radhius Pandhu Winata selaku Analis SDM Aparatur Ahli Madya menyampaikan pemahaman terkait Risiko dan Manajemen Risiko kemudian dilanjut oleh narasumber kedua dari Inspektorat yaitu May Syarah, selaku Auditor Ahli Pertama menyampaikan cara profiling Risiko dengan Formulir Manajemen Risiko. Sampai saat ini di Kemenko Perekonomian masih mengelola risiko yang bersifat negatif. • Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemegang dalam Program Magang Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Batch II berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/939/LP.03.00/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. Adapun rencana Kementerian Ketenagakerjaan membuka 80.000 peserta magang pada Batch II ini yang sebelumnya sudah membuka lowongan 20.000 peserta magang pada Batch I. Rencana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka 100 kebutuhan magang lulusan perguruan tinggi yang akan di tempatkan di Kementerian

		<p>Koordinator Bidang Perekonomian mulai tanggal 24 November 2025 s.d. 23 Mei 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana kebutuhan magang nasional tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengusulkan penanggungjawab dan admin yang akan bertugas untuk menginput dan memproses rencana kebutuhan pada aplikasi Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan (maganghub.kemnakerj.go.id), sampai dengan proses seleksi dan penerimaan tenaga magangnya. • Pada tanggal 3 November 2025, Tim/Kelompok Kerja Manajemen SDM menyelenggarakan SDM Series #2: Kebijakan Kehadiran Kerja Pegawai (Presensi dan Cuti) ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan ini bertujuan sebagai refreshment kepada ASN Kemenko Perekonomian mulai dari kebijakan Kehadiran Kerja Pegawai ASN sesuai Permenko Nomor 3 Tahun 2025 dan teknis kebijakan terkait penggunaan aplikasi presensidan cuti di lingkungan Kemenko Perekonomian. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 250 orang secara daring menggunakan zoom meeting. • Untuk bahan materi terkait kegiatan ini dapat di unduh melalui landing page https://sites.google.com/view/sdm-ekon-landingpage/home • Seleksi peserta magang nasional lulusan perguruan tinggi yang mendaftar pada Kemenko Perekonomian dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 sesuai dengan Pengumuman yang disampaikan Kepala Biro Umum dan SDM melalui portal rekrutmen.ekon.go.id. • Adapun metode seleksi menggunakan Tes Potensi Akademik (TPA) yang diambil dari soal-soal TPA Bappenas sejumlah 100 soal. Seleksi TPA tersebut
--	--	---

			<p>dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 583 peserta dari 610 peserta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapun rangkuman kegiatan seleksi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kebutuhan Magang disampaikan melalui Surat Semenke Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan usulan rencana pemagang sejumlah 100 orang kualifikasi Pendidikan Sarjana (S-1) pada tanggal 4 November 2025 - Pendaftaran Peserta Magang lewat maganghub.kemnaker.go.id mulai tanggal 6 s.d. 14 November 2025 dengan total peserta yang mendaftar yaitu 610 orang - Tanggal 17 November 2025 diadakan seleksi dengan metode tes potensi akademik (TPA) dengan jumlah 100 soal yang dilaksanakan secara daring diikuti 583 peserta - Dari 583 peserta terpilih 100 peserta dengan nilai terbaik - Terdapat 3 orang mengundurkan diri karena sudah diterima kerja di Perusahaan lain sehingga total peserta magang 97 orang - Pelaksanaan magang nasional Kemenko Perekonomian mulai tanggal 24 November 2025 s.d. 23 Mei 2026 (6 bulan) • Pelaksanaan SDM Series #3: Welcoming Home Seminar - Alumni Berbagi Day 1 LPDP HACK : Tips, Trik, dan Strategi Lulus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 12 November 2025 secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawai ASN yang hendak meningkatkan pendidikannya lewat beasiswa LPDP. Narasumber pada kegiatan ini adalah para alumni LPDP yang telah menyelesaikan studinya. Adapun landing page untuk bahan materi pada kegiatan
--	--	--	---

			<p>ini dapat di lihat pada laman berikut https://sites.google.com/view/sdm-series-3/home.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi Program Magang Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 24 November 2025 yang diikuti oleh 95 orang hadir fisik pada Gedung AA Maramis, dan 2 orang lainnya secara daring melalui zoom meeting serta mentor dari Pemegang yang ditugasi oleh Unit Kerja. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan magang nasional, penggunaan aplikasi magang hub dalam mencatat kehadiran dengan melaporkan aktivitas harian, aktivitas bulanan dan teknis penilaian dari Mentor Pemegang yang nantinya sebagai penentu untuk menentukan apakah peserta magang sudah berhak mendapatkan uang saku pada setiap bulannya. Kegiatan dipandu oleh Kelompok Kerja Manajemen SDM. • Pelaksanaan SDM Series #4: Welcoming Home Seminar - Alumni Berbagi Day 2 - Unlocking Scholarship Opportunities: Lesson & Hack from Alumni Awardees Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 21 November 2025 secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawai ASN yang hendak meningkatkan pendidikannya lewat beasiswa. Narasumber pada kegiatan ini adalah para alumni penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Adapun landing page untuk bahan materi pada kegiatan ini dapat dilihat pada laman berikut https://sites.google.com/view/sdms-eries4/home. • Pelaksanaan SDM Series #5: Welcoming Home Seminar - Alumni Berbagi Day 3 - Policy Governance & Development Planning: Insights from Kertajati Airport and South Korea's Modernization Era pada
--	--	--	---

		<p>tanggal 26 November 2025 secara daring, melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawai ASN yang hendak meningkatkan pendidikannya lewat beasiswa. Narasumber pada kegiatan ini adalah para alumni penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Adapun landing page untuk bahan materi pada kegiatan ini dapat dilihat pada laman berikut https://sites.google.com/view/sdm-series-5/home.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 yang dihadiri oleh sebagian ASN sekitar Jakarta dengan jumlah kurang lebih 15.000 ASN dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta. • Pelaksanaan Evaluasi Aktualisasi dan Upacara Pelepasan Pelatihan Dasar CPNS Gelombang VII Tahun 2025 oleh 70 Peserta CPNS dari Kemenko Perekonomian dengan pelaksanaan evaluasi pada tanggal 2 Desember 2025 dan pelepasan pada tanggal 3 Desember 2025, bertempat pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian. Pada pelatihan dasar tersebut Kemenko Perekonomian mendominasi pencapaian nilai aktualisasi terbaik dari setiap angkatan. • Fasilitasi pendaftaran Jaminan Hari Tua dan Pensiun untuk PPPK Tahun 2025 Kemenko Perekonomian pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2025 di Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemberian jaminan sosial bagi ASN Kemenko Perekonomian dengan menggunakan fasilitas asuransi dari Taspen. • Telah dilaksanakan Sosialisasi Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Pelaksana Selasa, 9 Desember 2025 kepada seluruh PNS
--	--	---

			<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Umum dan SDM, Bapak Hari Nugroho. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Direktur Pengadaan dan Mutasi, Bapak Paulus Dwi Laksono Harjono dan Analis SDM Aparatur, Ibu Tina, Badan Kepegawaian Negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Seleksi Program Magang Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Batch III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025, menggunakan metode Tes Potensi Akademik (TPA) secara daring pada tanggal 10 Desember 2025 mulai pkl 09.15 s.d. 11.15 WIB, diikuti oleh 229 peserta dari 255 peserta, untuk 11 posisi jabatan. • Penerimaan dan penempatan tenaga magang dari program magang nasional Batch III, sejumlah 11 orang • Pelaksanaan Talkshow “Tanggung Jawab di Dua Arah: Memahami dan Mengelola Tantangan sebagai Sandwich Generation” pada tanggal 23 Desember 2025 di Gedung Pos Ibukota, Ruang Breakout Room lantai 5. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ibu Oktina Burlianti selaku Psikolog. Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah sebagian besar ASN muda dan yang telah memiliki keluarga. <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional dalam rangka penguatan sistem merit dan pengembangan karier berbasis kompetensi. Uji Kompetensi Teknis tersebut dilaksanakan bagi 78 pegawai yang diusulkan untuk kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan fungsional, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Analis Kebijakan; b) Perencana; c) Analis SDM Aparatur;
--	--	--	--

			<p>d) Pranata Humas;</p> <p>e) Analis Anggaran;</p> <p>f) Analis Hukum;</p> <p>g) Perancang Undang-Undang; dan</p> <p>h) Penata Laksana Barang.</p> <p>i) Uji Kompetensi Teknis dimaksud dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi 17 pegawai yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat. • Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui <i>assessment center</i> bagi seluruh PNS sesuai dengan level jabatan. Asesmen tidak hanya digunakan untuk pemetaan kompetensi saat ini, tetapi juga untuk proyeksi pengembangan karier pegawai yang telah memenuhi persyaratan kenaikan jabatan. Lebih lanjut, hasil asesmen dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai. Data SDM tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 380 pegawai telah mengikuti <i>assessment center</i> dengan kategori hasil optimal, cukup optimal, dan kurang optimal, yang memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan dan potensi pegawai. Sementara itu, 238 pegawai dengan hasil assessment yang belum sesuai level jabatan menjadi fokus pembinaan dan pengembangan kompetensi lanjutan, sedangkan 197 pegawai PPPK dan pegawai penugasan dicatat sebagai kelompok yang belum atau tidak menjadi objek asesmen penuh sesuai ketentuan jabatan PNS. • Pelaksanaan layanan Konseling untuk memastikan
--	--	--	--

			<p>keberlanjutan kinerja dan kesiapan pegawai dalam pengembangan karier. Dengan tersedianya dukungan melalui layanan Konseling, pegawai memperoleh ruang aman untuk mengelola tekanan kerja, konflik peran, maupun tantangan personal yang berpotensi memengaruhi kinerja, integritas, dan pengambilan keputusan karier. Pada tahun 2025, layanan konseling telah dimanfaatkan oleh 6 (enam) pegawai, dengan rincian dua pegawai terkait permasalahan keluarga dan pekerjaan yang masih dalam pendampingan lanjutan, serta empat pegawai dengan isu personal, keluarga, dan pernikahan yang telah diselesaikan. Hasil konseling (tanpa melanggar prinsip kerahasiaan) juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun intervensi pengembangan kompetensi, penempatan yang lebih tepat, serta pembinaan karier yang selaras dengan potensi dan kondisi pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan disiplin telah dilaksanakan secara konsisten dilaksanakan oleh Biro Umum dan SDM, karena kepatuhan terhadap ketentuan disiplin termasuk kehadiran kerja, etika perilaku, serta kepatuhan administratif, menjadi prasyarat penting dalam penilaian kinerja, promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan pengembangan karier pegawai. Data penegakan disiplin selama tahun 2025: <ul style="list-style-type: none"> • - Hukuman Disiplin Tingkat Berat: 1 orang pejabat fungsional ahli pertama; • - Hukuman Disiplin Tingkat Ringan: 1 orang pejabat fungsional ahli muda; dan • - Pembinaan atas pelanggaran disiplin kehadiran terhadap 77 orang pegawai dari berbagai jenjang mulai dari pelaksana, fungsional pertama,
--	--	--	--

			<p>fungsional muda, hingga fungsional madya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, penyempurnaan, dan penetapan regulasi internal sebagai landasan serta penguatan tata kelola/Manajemen ASN sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenko Kehadiran Kerja Pegawai (publish) 2. Permenko Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN (publish) 3. SE Izin Perkawinan dan Perceraian (publish) 4. Pedoman Mentoring dan PKTBT CPNS (publish) 5. Permenko Tunjangan Kinerja (legal drafting) 6. Permenko Manajemen Talenta (legal drafting) 7. Permenko Pola Karier (legal drafting) 8. Persesmenko Coaching, Mentoring, Konseling (legal drafting)
3.	Pengangkatan ASN (PPPK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Terlaksana	Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total 135 orang pengangkatan 2025 dan 25 orang pengangkatan 2024 tanggal 17 Oktober 2025. Pelantikan dilaksanakan pada Ruang Grahasawala, kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian..
4.	Pelaporan dan Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Implementasi Manajemen ASN sesuai NSPK	Terlaksana	Karena sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 belum ada pembukaan penilaian pada https://indeksnspk.bkn.go.id untuk tahun 2025, namun seluruh bukti dukung yang memnuhi NSPK Manajemen ASN Kemenko Perekonomian sudah terkumpul, dan siap disampaikan ke BKN jika aplikasi indeks NSPK dibuka penilaian kembali

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya biaya-biaya perjalanan dinas, dan efisiensi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional dari jabatan lain.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya keterbatasan anggaran sehingga cukup menyulitkan ketika terdapat kebutuhan kegiatan manajemen SDM sebagai bentuk internalisasi.
2. Belum adanya ketentuan penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN pada tahun 2025 oleh BKN, sehingga pelaksanaan penilaian hanya sebatas penilaian yang dilakukan secara mandiri.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan realokasi atau revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendesak atau berkoordinasi dengan Bagian Rumah Tangga untuk melakukan *sharing* pembiayaan seperti konsumsi rapat/sosialisasi.
2. Koordinasi lebih lanjut dengan BKN agar mendapatkan informasi terkait model penilaian manajemen ASN seperti apa yang diharapkan BKN.

1.5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Latar Belakang

Menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dalam upaya melakukan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Turunannya, maka kegiatan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang haruslah dilaksanakan secara maksimal dengan berlandaskan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang mengedepankan pencapaian tujuan Pengadaan *Value For Money* (VFM) dengan Strategi Organisasi Pengadaan yang relevan, sehingga diberikanlah sebuah instrumen penilaian terhadap pengelolaan pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan dimana penilaiannya dilakukan setiap tahun

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85. Dikarenakan penilaian dilakukan melalui penarikan data pada aplikasi pendukung pengelolaan Barang Jasa (SIRUP dan SPSE) didukung dengan kertas kerja rekapan Pengadaan Barang/Jasa masing-masing unit kerja setiap tahunnya, sehingga tidak ada progres periodik yang dapat dipantau, namun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya memenuhi target **IKU 1.5.**, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	85* Predikat Baik	75,76* Predikat Baik	75,76%* 89,12%**

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 berbeda dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024. Realisasi triwulan IV didorong oleh penambahan SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta komitmen bersama setiap pengelola pengadaan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian yang semakin terbangun untuk memaksimalkan setiap transaksi pengadaan tercatat dan terseistem sehingga dapat mendorong Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa terus stabil dan target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksana	Tercapainya nilai ITKP dengan angka 75,76 dengan predikat baik
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Tender/Seleksi/Pengadaan Langsung)	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan melalui mekanisme Tender/Seleksi sebanyak 8 paket Pengadaan Langsung sebanyak 617 paket, Pengadaan melalui ePurchasing sebanyak 31 paket, Pengadaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (Pengadaan Dikecualikan) sebanyak 57 paket.

3.	Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan Sistem Informasi Pengadaan	Terlaksana	Pendampingan dan Coaching Clinic Pencatatan non e-Tendering, non e-Purchasing, dan SIRUP
4.	Pendaftaran Pengajuan JF PBJ Ahli Pertama (1)	Tertunda	Pengangkatan CPNS JF PBJ Ahli Pertama dijadwalkan pada Triwulan II TA 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan melalui mekanisme Seleksi/Tender sebanyak 8 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp16.447.020.906,-
2. Pengadaan Langsung sebanyak 617 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp11.942.982.068,-
3. Pengadaan melalui E-Purchasing sebanyak 31 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp9.848.401.118,-
4. Pengadaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (Pengadaan Dikecualikan) sebanyak 57 paket pengadaan dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp13.173.740.416,-

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya salah satu implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di bagian pengadaan barang/jasa yaitu dengan memaksimalkan pendampingan berkala melalui PPBJ sebagai agen pengadaan di masing-masing unit kerja, tanpa menyelenggarakan kegiatan rapat atau pendampingan secara massal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, kendala yang mempengaruhi upaya pelaksanaan rencana aksi pada IKU 1.5. terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Masih rendahnya peran aktif dari pegawai atau pihak yang berkepentingan terhadap kewajiban dalam pelaksanaan Perencanaan Pengadaan yang Akuntabel dan Berkelanjutan;
2. Masih rendahnya kesadaran pegawai atau pihak yang berkepentingan dalam memprioritaskan proses pengadaan yang terencana dan sistematis;
3. Masih minimnya SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehubungan dengan Perhitungan Beban Kerja Unit Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kemenko Bidang Perekonomian;
4. Masih belum Optimalnya Kinerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di setiap Unit Kerja di Lingkup Kemenko Bidang Perekonomian;
5. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Secara rutin mengadakan pendampingan dan konsultasi kepada setiap pegawai pengelola pengadaan barang/jasa di unit kerja masing-masing melalui PPBJ;
2. Mengadakan sosialisasi terkait Proses Bisnis Pengadaan dengan unit kerja terkait untuk mendukung peningkatan penilaian ITKP Kemenko Bidang Perekonomian;
3. Mendalami hak dan kewajiban pada unit kerja terkait perannya dalam Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Melakukan pendampingan berkala dan berkelanjutan terhadap kondisi-kondisi praktis terhadap Pengadaan Barang/Jasa di unit kerja terkait.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian Yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian Yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu;
2. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan;
3. Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik;
4. Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu;
5. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan; dan
6. Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**2.1. Persentase
Penyelesaian
Layanan SDM
yang Tepat
Waktu**

Latar Belakang

Indikator ini mengukur sejauh mana layanan terkait manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberikan oleh Biro Umum dan SDM diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Layanan SDM mencakup antara lain: pengangkatan, mutasi, promosi, pensiun, administrasi kepegawaian, layanan cuti, dan layanan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Tepat waktu berarti penyelesaian layanan sesuai dengan batas waktu pelayanan yang telah distandarkan dan disepakati.

Hasil Pengukuran Kinerja

Penghitungan Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu [1] sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dengan formula sebagai berikut:

Penyelesaian Layanan SDM dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi:

No	Jenis Layanan	Dasar Hukum
1	Pangkat	<ul style="list-style-type: none"> • Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat • Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional • Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
2	Gaji dan Tukin	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil • PMK No. 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	Kenaikan Gaji Berkala	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ○ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4	Pensiun	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
5	Penerbitan Surat Tugas dan Perjanjian Tugas Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

6	Rekapitulasi Absen	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Petunjuk Teknis Rekapitulasi Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
---	--------------------	--

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 50% dari target Tahun 2025 sebesar 95% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu	Persentase	95%**	95%**	100%*
				100%**

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Layanan SDM Triwulan III	Terlaksana	Karena keterbatasan anggaran setelah kebijakan efisiensi maka diperlukan penyesuaian kegiatan untuk lebih mengutamakan pertemuan secara daring
2.	Pengadaan ASN	Terlaksana	Sudah pada tahap akhir yaitu pada penetapan NI PPPK dengan jumlah 135 PPPK pada tahun 2025

3.	Pengangkatan ASN	Terlaksana	Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total 135 orang pengangkatan 2025 dan 25 orang pengangkatan 2024 tanggal 17 Oktober 2025. Pelantikan dilaksanakan pada Ruang Grahasawala, kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian..
4.	Pelayanan Kepangkatan	Terlaksana	<p>Layanan kenaikan pangkat kepada ASN yang telah memenuhi syarat dan telah diusulkan dari atasan langsung yang bersangkutan. Pada Triwulan III layanan kenaikan pangkat PNS yang terlaksana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode 1 Oktober: 15 pegawai • Periode 1 Desember: 13 pegawai • Periode 1 Januari 2026: 22 pegawai (yang sudah terproses pada bulan Desember 2025)
5.	Tata kelola Pola Karier dan Pengembangan Karier ASN	Terlaksana	<p>Draft Permenko Pola Karier Pegawai telah disusun dan diserahkan ke Biro Hukum dan Organisasi untuk pengajuan legal drafting, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh tim SDM dan HO.</p> <p>Pemberhentian Jabatan Fungsional dan Status Kepegawaian sebanyak 2 orang pegawai.</p>
6.	Pelaksanaan Mutasi dan Penugasan ASN	Terlaksana	<p>Pelaksanaan pelayanan mutasi/ pindah instansi ke Kemenko Perekonomian dari Pemda Daerah terdapat 2 pegawai TMT 1 November 2025 dan 1 pegawai TMT 1 Januari 2026.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan mutasi/ pindah instansi ke Pemda Daerah terdapat 1 pegawai TMT 1</p>

			Januari 2026 dan pelayanan penugasan PNS ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi 1 pegawai TMT 2 Januari 2026.
7.	Fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan sosialisasi pengelolaan kinerja secara daring dan pendampingan/asistensi baik secara langsung maupun daring melalui zoom bagi pegawai untuk penyusunan dan pengumpulan kinerja.</p> <p>Setelah pelantikan PPPK pada 17 Oktober 2025, kemudian dilaksanakan sosialisasi penilaian kinerja ASN melalui aplikasi e-Kinerja secara hybrid pada 23 Oktober 2025.</p>
8.	Pembinaan Disiplin dan Kode Etik ASN	Terlaksana	<p>Pelaksanaan penegakan disiplin selama tahun 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman Disiplin Tingkat Berat: 1 orang pejabat fungsional ahli pertama; • Hukuman Disiplin Tingkat Ringan: 1 orang pejabat fungsional ahli muda; dan • Pembinaan atas pelanggaran disiplin kehadiran terhadap 77 orang pegawai dari berbagai jenjang mulai dari pelaksana, fungsional pertama, fungsional muda, hingga fungsional madya.
9.	Layanan Cuti	Terlaksana	<p>Kelompok Kerja Manajemen SDM telah memberikan layanan konsultasi terkait cuti kepada ASN Kemenko Perekonomian baik melalui whatsapp maupun email.</p> <p>Pengajuan Cuti pada TW IV sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuti Bersalin = 5 • Cuti Besar = 11 • Cuti Karena Alasan Penting = 53 • Cuti Sakit = 281 • Cuti Tahunan = 873

10.	Layanan Pensiun dan Pemberhentian ASN	Terlaksana	<p>Pemrosesan pensiun PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sebanyak 3 pegawai terdiri dari 1 pegawai TMT 1 Januari 2026 dan 2 pegawai TMT 1 Februari 2026.</p> <p>Pemrosesan surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS bagi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 1 pegawai.</p>
11.	Layanan Penggajian, Tunjangan, Fasilitas, dan Perlindungan ASN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselesaikannya pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan sesuai dengan waktunya yaitu di awal bulan untuk gaji dan tunjangan, untuk uang makan dibayarkan pada minggu ke dua atau ketiga bulan berikutnya • Fasilitasi pendaftaran Jaminan Hari Tua dan Pensiun untuk PPPK Tahun 2025 Kemenko Perekonomian pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2025 di Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemberian jaminan sosial bagi ASN Kemenko Perekonomian dengan menggunakan fasilitas asuransi dari Taspen.
12.	Pelaporan Kinerja Tahunan Pelaksanaan Manajemen ASN	Terlaksana	<p>Sudah menyusun laporan kinerja Tahunan Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun proses pengayaan laporan terus dilakukan sampai Januari 2026</p>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemberian konsultasi baik secara formal maupun informal melalui *direct* ataupun media telekomunikasi.

2. Penyelesaian masalah terkait layanan SDM dengan cara mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan salah satu proses bisnis yang mendukung penilaian IKPA melalui proses rekonsiliasi terhadap dokumen SPM, menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta kepatuhan dalam penyampaian Laporan Keuangan. Penyampaian laporan keuangan diukur melalui indeks ketepatan waktu penyelesaian dokumen keuangan dengan mempertimbangkan batas waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang diatur sebagaimana berikut:

- Laporan Keuangan Semester I: paling lambat 31 Juli tahun berjalan
- Laporan Keuangan Triwulan IV: paling lambat 31 Oktober tahun berjalan; dan
- Laporan Keuangan Tahunan
- LK Unaudited paling lambat tanggal terakhir bulan Februari tahun berikutnya
- LK Asersi Final ditentukan dengan kesepakatan Pemerintah dan BPK

Formula atas penilaian indeks ketepatan waktu penyelesaian dokumen keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Indeks 1 : LK disampaikan terlambat 4 hari kerja atau lebih
- b. Indeks 1,5 : LK disampaikan terlambat 3 hari kerja
- c. Indeks 2 : LK disampaikan terlambat 2 hari kerja
- d. Indeks 2,5 : LK disampaikan terlambat 1 hari kerja
- e. Indeks 3 : LK disampaikan tepat waktu
- f. Indeks 3,5 : LK disampaikan lebih cepat 1 hari kerja
- g. Indeks 4 : LK disampaikan lebih cepat 2 hari kerja
- h. Indeks 4,5 : LK disampaikan lebih cepat 3 hari kerja
- i. Indeks 5 : LK disampaikan lebih cepat 4 hari kerja atau lebih

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 5. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Indeks 3 (skala 5). Adapun target triwulan sebesar 3, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 5 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 5 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	Indeks	3 dari 5*	5 dari 5	100%

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan III tahun 2024. Laporan Keuangan adalah laporan rutin yang disusun dan dilaporkan sesuai ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, maka dapat diproyeksikan bahwa realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan dapat tercapai sesuai target di tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III 2025 yang Tepat Waktu	Terlaksana	Laporan Keuangan <i>Triwulan III</i> telah disampaikan tepat waktu ke Kementerian Keuangan pada bulan Oktober 2025
2.	Koordinasi kegiatan reviu laporan keuangan dengan pihak APIP dan Eksternal	Terlaksana	Pelaksanaan koordinasi reviu laporan keuangan telah dilaksanakan.

3.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Terlaksana	Pelaksanaan rekonsiliasi telah dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan dalam juknis penyelesaian rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan asersi final.
4.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Kemenko Bidang Perekonomian Dengan KPPN Jakarta II Melalui Sistem Aplikasi Monsakti	Terlaksana	Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Tahun 2025 telah dilaksanakan dan telah memperoleh surat hasil rekonsiliasi (SHR)

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan akuntansi keuangan;
2. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPB;
3. Rekonsiliasi dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan

Aspek efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 karena penyusunan Laporan Keuangan tidak bergantung pada ketersediaan anggaran tetapi mengutamakan sistem aplikasi yang digunakan dan kapabilitas SDM dalam menyusun laporan tersebut.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Tidak terdapat kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan *Triwulan III* pada Triwulan IV tahun 2025 karena sudah mengikuti ketentuan yang berlaku dari Kementerian Keuangan.

2.3. Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik

Latar Belakang

Pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik secara optimal merupakan bentuk penerapan SPBE agar akses informasi melalui arsip didapat dengan cepat dan tepat sehingga memudahkan administrasi kinerja organisasi. Pengelolaan arsip elektronik adalah pemrosesan arsip mulai dari tahap penciptaan (menerima naskah masuk, mendistribusikan atau mendisposisikan nya dan membuat naskah keluar) lalu dilakukan pemberkasan dalam aplikasi SRIKANDI

Kriterianya: unit kerja yang secara optimal mengimplementasikan seluruh fitur dalam aplikasi srikandi termasuk pemberkasan arsip secara elektronik.

Pemenuhan unit kerja yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Elektronik secara Optimal adalah unit kerja yang telah melakukan alih media arsip sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan arsip serta melaksanakan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip elektronik dalam aplikasi SRIKANDI. Presentase dari setiap ketentuan yang harus dipenuhi secara ketentuan nasional dalam rangka penyelenggaraan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk mengukur Persentase Unit Kerja yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Elektronik secara Optimal.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada nilai yang ditetapkan oleh Arsip Nasional RI di akhir tahun anggaran. Pengelolaan Arsip Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak dapat diukur karena Indeks Penyelenggaraan Arsip diukur setiap tahun yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik	Persentase	90%*	98,09	109%

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 merupakan tahapan akhir dalam rangkaian penyelenggaraan kearsipan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong dengan kerjasama tim yang baik maka diprediksikan Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.3 Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pemberkasan Arsip pada Aplikasi SRIKANDI	Terlaksana	Pelaksanaan kegiatan pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI dilakukan secara rutin selama 1 tahun pada seluruh unit pengolah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2.	Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI dilakukan dengan memberikan edaran kepada seluruh pegawai agar aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan persuratan.
----	---	------------	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya Seluruh kegiatan dan penyelesaian pengelolaan arsip elektronik dilakukan di dalam kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan tidak membebani DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terkadang masih ada kelambatan pada pada sistem di aplikasi SRIKANDI.
2. Belum semua pegawai di Kemenko Perekonomian rutin dan aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Tim SRIKANDI Pusat (Arsip Nasional RI);
2. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI pada seluruh pegawai di Kemenko Perekonomian.

2.4. Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu

Latar Belakang

Menyikapi amanat Pengelola Barang yang mengedepankan pengelolaan BMN dengan prinsip *Prudence* dan *Zero Mistake*, sehingga diberikanlah sebuah instrumen penilaian terhadap pengelolaan BMN pada masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang penilaiannya dilakukan setiap tahun.

Menindaklanjuti kebutuhan dalam pemenuhan IPA tersebut, diperlukan upaya terbaik dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan yang diperlukan untuk pemenuhan parameter IPA yang diberikan oleh Pengelola Barang.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90%, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada kondisi parameter yang tidak sepenuhnya menjadi kendali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga target kinerja mencakup upaya terbaik yang dapat dilakukan dalam mendukung pemenuhan parameter yang digunakan dalam Penilaian IPA. Adapun target Triwulan IV sebesar 100% atas pemenuhan Rencana Aksi yang ditetapkan guna mendukung upaya pemenuhan target kinerja tahunan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu	Persentase	100%** (dalam upaya pemenuhan target 90%*)	100%*	100*

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda jauh dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh kerjasama internal yang baik antar Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta koordinasi eksternal yang efektif dan efisien bersama Pengelola Barang. Dengan kondisi tersebut, maka target kinerja tahunan dalam penyampaian laporan dapat dicapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.4 Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyampaian RKBMN Tahun 2027 Pada H-4 Batas Pengumpulan Dokumen	Terlaksana	Dokumen disampaikan dengan Tepat Waktu sesuai ketentuan Pengelola Barang
2.	Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh APIP

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya sesuai dengan kondisi efisiensi anggaran. Sehingga pemenuhan Rencana Aksi IPA Triwulan II 2025 tidak mengeluarkan biaya yang dapat membebani DIPA Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja tahunan. Namun, dalam upaya mencapai target kinerja tahunan, dapat dilakukan mitigasi sebagai bentuk pencegahan munculnya kendala yang dapat menghambat kinerja, upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal bersama Staf Pengelola Keuangan (SPK) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan transaksi BMN yang dapat menghambat proses penyusunan laporan-laporan *mandatory*; dan
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas transaksi Belanja Pemeliharaan untuk mencegah munculnya potensi reklasifikasi pengakuan Aset dari transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan proses pengakuan Aset yang semestinya.

2.5. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan

Latar Belakang

Pemanfaatan Sistem informasi Pengadaan merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indikator Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang mengukur tingkat operasional pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian.

Penilaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan terdiri dari 5 variabel sistem antara lain :

1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> bobot 10%
2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> bobot 5%
3. e-Purchasing (Toko Daring) >> bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%
4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> bobot 5%
5. e-Kontrak >> bobot 5%

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 23,6%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada pada Proyeksi Pencapaian Nilai setiap Indikator Sistem Informasi Pengadaan yang dinilai berdasarkan bobot yang telah ditetapkan.

Dikarenakan penilaian dilakukan melalui penarikan data secara akumulatif di 3 indikator sekaligus pada aplikasi pendukung pengelolaan Barang/Jasa (SiRUP dan SPSE) yang didukung dengan kertas kerja rekapan Pengadaan Barang/Jasa masing-masing unit kerja setiap tahun di triwulan 4 (Oktober 2025), sehingga tidak ada progres periodik yang dapat dipantau. Adapun target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar N/A, namun realisasi telah tercapai sebesar 22,9%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan	Persentase	23,6%*	22,9%	100%*
				97%**

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh komitmen bersama setiap pengelola pengadaan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian yang semakin terbangun untuk memaksimalkan setiap transaksi pengadaan tercatat dan tersistem sehingga dapat mendorong Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pengadaan	Terlaksana	Pendampingan dan Coaching Clinic Pencatatan non e-Tendering, non e-Purchasing, dan SIRUP

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya salah satu implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di bagian pengadaan barang/jasa yaitu dengan memaksimalkan pendampingan berkala melalui PPBJ sebagai agen pengadaan di masing-masing unit kerja, tanpa menyelenggarakan kegiatan rapat atau pendampingan secara massal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih ada PPK yang tidak tertib dalam mencatat perencanaan pengadaan melalui SIRUP.
2. Masih dibutuhkannya pendampingan intensif kepada Staf Pengelola Keuangan dalam menyelesaikan proses pencatatan pengadaan non-eTendering dan non-ePurchasing.
3. Masih sedikitnya PPK yang melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui *platform digital* Toko Daring.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan pembekalan kepada SPK dan PPK terkait Sistem Informasi PBJ yang berkaitan dengan proses transaksional melalui bimtek/sosialisasi/*coaching clinic*;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pencatatan perencanaan hingga realisasi pengadaan barang/jasa di setiap unit kerja.

2.6 Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Latar Belakang

Pemenuhan SDM pengelola pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indikator Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang mengukur tingkat operasional SDM Pengelola Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab proses pengadaan barang/jasa secara fungsional di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian.

Penilaian Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diperoleh dengan bobot 30%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 21,4%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Proyeksi Pencapaian Nilai setiap Indikator Sistem Informasi Pengadaan yang dinilai berdasarkan bobot yang telah ditetapkan.

Dikarenakan penilaian dilakukan melalui penarikan data secara akumulatif di 3 indikator sekaligus pada aplikasi pendukung pengelolaan Barang/Jasa (SIRUP dan SPSE) yang didukung dengan kertas kerja rekapan Pengadaan Barang/Jasa masing-masing unit kerja setiap tahun di triwulan 4 (Oktober 2025), sehingga tidak ada progres periodik yang dapat dipantau. Adapun target triwulan IV 2025 sebesar N/A, namun realisasi telah tercapai sebesar 21,4% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.6 Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	21,4%*	12,86%	100%* 60%**

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh komitmen bersama setiap pengelola pengadaan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian yang semakin terbangun untuk memaksimalkan setiap transaksi pengadaan tercatat dan tersistem sehingga dapat mendorong Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.6 Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pengelola PBJ Tingkat Lanjutan – <i>Certified Procurement Officer (CPOf)</i>	Tertunda	Pengangkatan CPNS JF PBJ Ahli Pertama dijadwalkan pada Triwulan II TA 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya salah satu implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di bagian pengadaan barang/jasa yaitu dengan memaksimalkan pendampingan berkala melalui PPBJ sebagai agen pengadaan di masing-masing unit kerja, tanpa menyelenggarakan kegiatan rapat atau pendampingan secara massal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu masih minimnya SDM PBJ sehubungan dengan perhitungan beban kerja Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa di Lingkup Kemenko Bidang Perekonomian.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melaksanakan pelatihan/pembekalan dalam bentuk peningkatan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu, Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Latar Belakang

Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas fungsi sebagai unit yang melaksanakan tata kelola Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemenuhan dan fasilitasi layanan umum dapat menunjang dan membantu dalam hal pencapaian kinerja unit kerja sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan layanan perencanaan dengan melakukan survei pelayanan ke unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun formulasi perhitungan indeks kepuasan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kepuasan} = \frac{\sum \text{Jumlah Rerata Jawaban dari Masing – masing Item Survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Setelah diperoleh nilai kepuasan maka dibanding ke dalam skala kategori penilaian

- a. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 – 4
- b. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
- c. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 – 3.00
- d. Sangat tidak puas (1), rentang nilai < 2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada evaluasi atas tren penilaian kepuasan layanan Biro Umum dan SDM pada beberapa periode penilaian sebelumnya. Penilaian atas kepuasan layanan dilakukan pada akhir periode tahunan yang dilakukan melalui survey sehingga tidak dilakukan penetapan untuk target triwulanan. Namun, pelaksanaan pelayanan umum dan sumber daya manusia tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan sesuai Rencana Aksi pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia tahun 2025 yang sudah ditetapkan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 4 dari 4 atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks	3 dari 4*	4 dari 4*	120%* (Memuaskan)

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Untuk Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4, sampai dengan laporan kinerja triwulan IV ini disusun, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan survey indeks kepuasan layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan survey dikoordinasikan oleh penanggungjawab survey layanan kepuasan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Selain pelaksanaan survey pada triwulan IV, unit kerja telah melaksanakan serangkaian upaya dalam mendukung realisasi target tahunan, yaitu melalui penyelenggaraan 11 rencana aksi sehubungan dengan pemberian layanan pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda/berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh serangkaian kegiatan yang mendukung terselenggaranya survey serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mengoptimalkan kepuasan layanan umum dan sumber daya manusia yang bersifat rutin setiap triwulan. Maka diprediksikan Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survey Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	Terlaksana	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia selaku unit di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan Survey Kepuasan Layanan Sekretariat. Adapun responden berasal dari pejabat/pegawai pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian dengan 5 aspek pelayanan

			<p>sebagai indikator penilaian, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Ketanggapan; (b) Keandalan; (c) Sarana dan Prasarana Fisik; (d) Kepastian; serta (e) Sikap. <p>Hasil survey Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menilai 4 layanan yang disediakan kepada para pengguna layanan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Layanan Keuangan; (b) Layanan SDM; (c) Layanan Rumah Tangga; dan (d) Layanan Protokol dan Tata Usaha. <p>Dari keempat layanan tersebut, didapatkan rata-rata Indeks Kepuasan Layanan pada Biro Umum dan SDM sebesar 3,56 atau Sangat Puas. Adapun realisasi tersebut melebihi target 2025 yang ditetapkan, yaitu sebesar 3 atau dengan kategori Puas.</p>
2.	Tindak Lanjut Survey Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	Terlaksana	<p>Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, terdapat beberapa saran dan masukan yang disampaikan kepada responden. Masukan dan saran tersebut menjadi salah satu dasar perbaikan performa kinerja di periode selanjutnya.</p> <p>Upaya tersebut dituangkan pada Rencana Aksi Kinerja Biro Umum dan SDM tahun 2026 yang di dalamnya terdiri dari berbagai langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2025 dan periode-periode sebelumnya.</p>

3.	<p>Persiapan Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Sebagai komitmen untuk terus memperbaiki kualitas dan efisiensi dalam pemberian layanan umum dan SDM, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah menyiapkan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026. Langkah-langkah ini dituangkan dalam Rencana Aksi setiap triwulannya untuk memantau perkembangan kesiapan pelaksanaan survey.</p>
4.	<p>Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop Bersama Unit Kerja</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Telah terlaksana sejumlah sosialisasi atau workshop dari masing-masing bagian/tim kerja. Beberapa di antaranya adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2025 dan Mekanisme Pembayaran Pada Katalog Versi 6 (13 Oktober 2025) • Sosialisasi Manajemen Risiko diselenggarakan pada tanggal 7 November 2025 peserta yang hadir 230 orang • Sosialisasi Magang Hub untuk Mentor Magang Nasional Lulusan Perguruan Tinggi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (18 November 2025) • Rapat Sosialisasi RPATA dan Workshop Pengelolaan Pengetahuan untuk Efisiensi dan Akurasi Layanan Keuangan (8 Desember 2025) • SDM Series #1: Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025,

			<p>dan peserta yang hadir 90 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Series #2: Kebijakan Kehadiran Kerja Pegawai (Presensi dan Cuti) ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 dan peserta yang hadir 243 orang • SDM Series #3: Welcoming Home Seminar – Alumni Berbagai Day 1 LPDP Hack: Tips, Trik, dan Strategi Lulus. Diselenggarakan pada tanggal 12 November 2025. Peserta yang hadir 85 orang • SDM Series #4: Welcoming Home Seminar – Alumni Berbagai Day 2 – <i>Unlocking Scholarship Opportunities: Lessons & Hack from Alumni Awardees.</i> Diselenggarakan pada tanggal 21 November 2025 peserta yang hadir 62 orang • SDM Series #5: Welcoming Home Seminar – Alumni Berbagai Day 3 – Policy Governance & Development Planning Insights from Kertajati Airport and South Korea's Modernization Era. Diselenggarakan pada tanggal 26 November 2025 yang dihadiri 80 peserta • SDM Series #6: Sosialisasi Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional, Struktural, dan Pelaksana. Diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2025 yang dihadiri 101 peserta • Sharing Knowledge Translating Data into Economic Insights: Enhancing Policy Brief Writing for Stronger
--	--	--	---

			<p>Evidence-Based Policy Decision, diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2025 yang dihadiri 53 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webinar GARUDA AI “Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Akselerasi dan Optimalisasi Proses Kerja Birokrasi, diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2025 yang dihadiri oleh 700 orang • SDM Series #7: Pelatihan MC: Kuasai Teknik dan Etika menjadi MC Profesional, diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2025 dan dihadiri 48 orang • SDM Series #8: Talkshow “Tanggung Jawab di Dua Arah” Memahami dan Mengelola Tantangan sebagai Sandwich Generation, diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2025 dan dihadiri 68 orang
5.	Pelaksanaan Layanan Penghasilan Pegawai dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai	Terlaksana	<p>Terlaksana tepat waktu setiap awal bulan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta pembayaran uang makan setelah proses rekapitulasi kehadiran pembayaran uang makan.</p>
6.	Layanan Administrasi Kepegawaian	Terlaksana	<p>Pemberian layanan berupa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala • Pegelolaan Belanja Pegawai sudah tercapai • Pengurusan administrasi pensiun PNS • Layanan Surat Keterangan Penghasilan sebanyak • Fasilitasi Cuti Pegawai, • Presensi Online, • Penyampaian Bukti Dukung Absen, • Konsultasi Kepegawaian,

			<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Surat Keterangan Aktif Bekerja. • Pembuatan ID Card ASN • Pembuatan Surat Tugas Belajar • Penatausahaan Penugasan Protokol Anggota Polisi dan TNI • Fasilitasi Taspen • Fasilitasi BPJS Kesehatan • Fasilitasi Jamkesmen dan Jamkestama • Pengurusan administrasi Ujian Dinas dan Ujian Penyetaraan Kenaikan Pangkat
7.	Meningkatkan Layanan Penyelesaian Tagihan dan Pelaksanaan Anggaran	Terlaksana	Peningkatan layanan penyelesaian tagihan dan pelaksanaan anggaran telah terlaksana dengan melakukan pembaruan aplikasi SIVERA.
8.	Optimalisasi Layanan Ruang Rapat	Terlaksana	Biro Umum dan SDM memberikan pelayanan terkait fasilitas sarana dan prasarana serta pemesanan Ruang Rapat. Pelayanan Ruang Rapat dioptimalkan dengan penggunaan pemesanan ruang rapat yang disediakan oleh pihak ketiga yaitu penyedia Building Management. Selain itu, ada peningkatan sarana dan prasarana internal untuk ruang rapat dengan adanya pengadaan alat audio dan visual berupa monitor TV atau proyektor, mic delegate, dan sound system. Oleh karena itu, layanan ruang rapat optimal sehingga rapat berjalan dengan kondusif.
9.	Pelayanan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban	Terlaksana	Pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban dilaksanakan dengan skema <i>outsourcing</i> dengan penyedia <i>Building Management</i> . Namun, pelaksanaan <i>outsourcing</i> tersebut tetap diawasi dengan berkoordinasi langsung bersama <i>Building Manager</i> dari penyedia <i>outsourcing</i> .

10.	Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	Terlaksana	Biro Umum dan SDM memberikan layanan peminjaman kendaraan dinas kepada unit kerja yang lain. Jumlah kendaraan dinas yang dapat dipinjamkan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda empat.
11.	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Terlaksana	Layanan sarana dan prasarana internal dilaksanakan dengan melakukan pengadaan belanja modal dan belanja sewa. Pada triwulan III, pengadaan sewa laptop dikonsolidasikan di Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring tolakan tagihan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi SAKTI satker 427752 dan 427755;
2. Monitoring pendaftaran kontrak akhir tahun 2025 dan kontrak Pra Dipa tahun 2026;
3. Monitoring penyelesaian tagihan akhir tahun 2025; dan
4. Pelaksanaan pelayanan Keprotokolanan dan Tata Usaha Pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilaporkan pada triwulan IV tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

1. Memaksimalkan penggunaan ruang rapat atau aula di kantor dalam penyelenggaraan rapat internal maupun eksternal;
2. Memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan *platform video conference* dalam penyelenggaraan sosialisasi atau *workshop*;
3. Pemanfaatan *website* dan aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pelayanan umum dan sumber daya manusia sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas.

sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp213.790.422.725 yang telah digunakan sepanjang tahun anggaran 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Hambatan yang terjadi pada Triwulan III masih dalam proses penyelesaian upaya perbaikan sehingga hambatan yang ada pada Triwulan IV merupakan hal yang sama. Seperti penggunaan patwal yang masih dihentikan dan pengadaan HT yang belum terealisasi;
2. Kekosongan jabatan pada Subbidang Tata Usaha Menteri hingga beberapa pos staf yang masih belum terisi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas unit dan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti penggunaan HT lama dan pembagian tim dengan penempatan beberapa lokasi dalam pelaksanaan agenda pendampingan Pimpinan.
2. Telah dilaksanakan restrukturisasi penempatan staf di Bagian Protokol dan TU Pimpinan serta adanya pengisian jabatan pada Subbidang Tata Usaha Menteri.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola di Unit Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola di Unit Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu, Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon IV didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum dan SDM dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Biro Umum dan SDM dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Umum dan Sumber Daya Manusia,

$$\% \text{ Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melaksana dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Renaksi yang diampu oleh Biro Umum dan SDM yang meliputi:

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General;
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB;
3. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai;
4. Tingkat Maturitas SPIP;
5. Nilai SAKIP;
6. Indeks Perencanaan Pembangunan;

7. Tingkat Digitalisasi Arsip;
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
9. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
10. Indeks Sistem Merit;
11. Indeks SPBE;
12. Capaian IKU;
13. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan);
14. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan);
15. Survei Penilaian Integritas (SPI); dan
16. Indeks BerAKHLAK

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada hasil pemetaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025. Adapun target triwulan sebesar 85% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 45 dari 47 indikator atau 112% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Persentase	85%	96%	112% (Memuskan)

Catatan:

* = Capaian Tahunan

** = Capaian Triwulan IV

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang pada tahun 2025 ditargetkan 85%. Sampai dengan laporan ini disusun, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah melakukan kegiatan maupun program kerja sehubungan dengan ketercapaian rencana aksi RB pada tahun 2025 yang meliputi 47 indikator. Adapun pada Triwulan IV tahun 2025 rencana aksi yang dilaksanakan sebanyak 13 indikator.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda/berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh hasil pemetaan rencana aksi yang diproyeksikan terealisasi pada unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan lingkup indikator yang sebagian besar serupa dengan periode penilaian sebelumnya. Oleh karena itu, diprediksikan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pemenuhan Bukti Dukung Rencana Aksi RB Triwulanan IV	Terlaksana	<p>Untuk Rencana Aksi untuk penguatan Indeks Sistem Merit, beberapa di antaranya adalah</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanakan Pengadaan ASN untuk pemenuhan formasi ASN• Pemenuhan dokumen bukti dukung untuk penilaian NSPK manajemen ASN• Penetapan Peraturan Pola Karier Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (masih dalam bentuk Draft)• Penetapan Peraturan Manajemen Talenta Kemenko Perekonomian (masih dalam bentuk Draft)• Peningkatan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan, baik secara klasikal, maupun non klasikal (target 120 orang dan realisasinya lebih dari target)• Penyusunan panduan coaching dan mentoring dalam rangka pengembangan kompetensi ASN (masih dalam draft)• Penyusunan peraturan internal pembayaran tunjangan kinerja sesuai PermenPANRB nomor 6

			<p>Tahun 2022 (proses legal drafting Biro HO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan implementasi peraturan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	<p>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan IV dan Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV berdasarkan target yang dituangkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Telah dilakukan juga penyusunan <i>draft</i> awal Perjanjian Kinerja berdasarkan evaluasi dari hasil Rapat Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian tanggal 8 Januari 2026.</p>
3.	<p>Penyusunan TOR dan RAB Atas Revisi Renja 2025</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilaksanakan penyusunan TOR dan RAB Triwulan IV atas revisi Renja 2025</p>
4.	<p>Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan IV</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2025, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia memperoleh nilai akhir 98,4 dengan kategori AA (Sangat memuaskan). Seluruh naskah dinas yang diterbitkan, mulai dari pengonsepan hingga penandatanganan, telah diproses melalui aplikasi SRIKANDI. Termasuk juga proses disposisi dari Kepala Biro kepada bawahan yang semuanya diproses dan diarsipkan secara digital dengan SRIKANDI.</p>

5.	Monev Realisasi Anggaran Triwulanan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan setiap bulan yang tertuang dalam surat realisasi anggaran dan disebarakan kepada setiap unit kerja (PPK)
6.	Penyusunan RPD Triwulanan IV	Terlaksana	Penyusunan RPD TW IV telah terlaksana yang dikoordinasikan oleh Bagian Anggaran
7.	Implementasi LLAT	Terlaksana	Sosialisasi LLAT telah terlaksana begitu pula dengan pelaksanaan LLAT Tahun 2025 yang telah berjalan dengan baik.
8.	Monev Pencatatan SIRUP Triwulan IV	Terlaksana	Monev pencatatan dan pengisian SIRUP dilakukan dalam bentuk pendampingan dan Coaching Clinic Pencatatan non e-Tendering, non e-Purchasing, dan SIRUP.
9.	Pengisian SIRUP	Terlaksana	Monev pencatatan dan pengisian SIRUP dilakukan dalam bentuk pendampingan dan Coaching Clinic Pencatatan non e-Tendering, non e-Purchasing, dan SIRUP.
10.	Penyusunan Usulan Formasi ASN	Terlaksana	Dilakukan oleh Kelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum dan Organisasi

11.	Penyusunan Bahan LOM Triwulanan IV	Terlaksana	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal Evaluasi Kinerja 2025 dan Strategi Kerja 2026 Biro Umum dan SDM pada 19 Desember 2025. Rapat diselenggarakan untuk melakukan koordinasi atas hasil evaluasi pelaksanaan target kinerja dan anggaran hingga akhir tahun 2025 serta perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2026. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro SDM dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan <i>brainstorming</i> terkait Penguatan Karakter ASN Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
12.	Koordinasi Hasil Rekomendasi BPK	Terlaksana	Biro Umum dan SDM berkomitmen untuk menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk perbaikan kinerja layanan di unit kerja. Untuk triwulan IV tahun 2025, telah disampaikan jawaban atas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal semester II sehubungan dengan temuan duplikasi pembayaran yang harian dan uang makan.
13.	Dukungan Publikasi Konten Dan Penggunaan Logo BerAKHLAH Triwulan IV	Terlaksana	Sudah dilakukan misalnya dengan menampilkan Logo Berakhlak pada sejumlah bahan paparan, baik pada saat rapat/sosialisasi/ <i>workshop</i> internal dan eksternal.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut, yaitu secara rutin telah dilakukan monitoring atas pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa target telah tercapai sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati pada

Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan telah melibatkan semua pegawai di unit kerja dalam prosesnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

1. Memaksimalkan penggunaan ruang rapat atau aula di kantor dalam penyelenggaraan rapat internal maupun eksternal;
2. Memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan *platform video conference* dalam penyelenggaraan sosialisasi atau *workshop*;
3. Pemanfaatan *website* dan aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pelayanan umum dan sumber daya manusia sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pada periode selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia pada tahun 2026 yang dilakukan dengan menyusun skala prioritas dan meningkatkan monitoring ketercapaian target dari masing-masing komponen reformasi birokrasi di unit eselon agar sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun.

Jakarta, 14 Januari 2026
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia



Hari Nugroho